

ANALISIS PENGARUH IPM, INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Lailan Syafrina Hasibuan
Universitas Sumatera Utara
Email: lailansyafrina40@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis factor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (Path Analysis) dengan alat analisis SPSS AMOS 22. Periode penelitian tahun 2014-2019, dengan ruang lingkup data 34 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, IPM, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Melalui pengangguran, IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: IPM, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan.

Abstract

Poverty is a global issue faced by many countries in the world, including Indonesia. In the Sustainable Development Goals (SDGs) or Sustainable Development Goals (SDGs) poverty reduction is an issue that receives serious attention. The specific aim of this research is to empirically prove and analyze the factors that influence poverty in Indonesia. The data analysis method used in this study is the path analysis method (Path Analysis) with the SPSS AMOS 22 analysis tool. The research period is 2014-2019, with data coverage of 34 provinces in Indonesia. The results showed that HDI, inflation had a negative and significant effect on poverty. While economic growth and unemployment did not have a significant effect on poverty. Through unemployment, HDI, inflation and economic growth do not significantly influence poverty in Indonesia.

Keywords: HDI, inflation, economic growth, unemployment, poverty

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian serius. Hal ini terbukti dengan masuknya penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun (Bappenas, 2018). Kemiskinan yang semakin luas serta angka yang tinggi merupakan inti dari semua masalah pembangunan (Todaro M. P., 2011).

Pada tataran nasional, kemiskinan juga mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah untuk diatasi akan tetapi bukan hal yang sulit diupayakan. Kemiskinan akan selalu mendapat tempat khusus untuk diperhatikan. Sebagaimana presiden Joko Widodo saat memproklamkan Program Nawacita yang terdiri dari Sembilan prioritas pembangunan. Terdapat dua program nawacita yang mengarah pada pengentasan kemiskinan, yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;

dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia pintar dan program Indonesia sehat. Disamping itu pengentasan kemiskinan tidak hanya diprioritaskan pada pemerintahan yang sekarang, melainkan pemerintah pada orde lama juga mengupayakan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan. Sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan publikasi BPS diketahui bahwa persentase kemiskinan mengalami penurunan. Persentase kemiskinan Nasional mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan tingkat persentase sebesar 9,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 persen. Penurunan persentase kemiskinan terjadi di seluruh Provinsi. Papua merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 27,74 persen pada tahun 2019. Sedangkan yang memiliki tingkat persentase kemiskinan terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat persentase sebesar 3,57 tahun 2018 dan 3,47 persen pada tahun 2019.

Pengangguran merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan yang sulit dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja. Menurut (Hasyim, 2016), pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan akan menurun. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan maka akan menimbulkan kemiskinan. Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Artinya jika penduduk suatu wilayah mengalami kondisi kemiskinan maka penduduk tidak dapat memperbaiki kualitas sumber dayanya karena membutuhkan biaya yang

cukup tinggi. Dengan rendahnya tingkat kualitas sumber daya yang dimiliki maka akan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Penduduk yang kesulitan mendapatkan pekerjaan maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan yang pada akhirnya menambah tingkat kemiskinan.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sangat erat hubungannya. Kedua masalah tersebut seringkali dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat disebabkan oleh tingginya pengangguran. Hasil penelitian (Shinta, 2017) mengemukakan bahwa pengangguran dan kemiskinan memiliki slop positif artinya ketika pengangguran naik maka akan diikuti oleh kenaikan kemiskinan. Dalam hal ini ketika seseorang menganggur tentunya tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya kebutuhan tidak terpenuhi. Saat kebutuhan tidak terpenuhi maka akan menambah jumlah penduduk miskin. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (Nopirin, 2014). Inflasi meningkat akan memberikan efek buruk yaitu tingkat daya beli masyarakat akan turun dan mengurangi tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan tersebut diukur menggunakan IPM. Menurut (Todaro M. P., 2006) pertumbuhan ekonomi memiliki efek terhadap IPM. Tingginya Pertumbuhan ekonomi akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan dengan salah satu komposit dari IPM yaitu indikator pendapatan.

Pasca krisis tahun 1998, Inflasi Indonesia terus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan. Setelah

dasyatnya goncangan krisis finansial pada tahun 1998 pemerintah terus menerus menjaga tingkat kestabilannya. Inflasi akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan perekonomian. Inflasi bisa berdampak positif dan negatif, tergantung dari besaran inflasi yang terjadi. Inflasi rendah berpengaruh positif dan mendorong perekonomian, meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong investasi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat melemahkan perekonomian, menambah biaya produksi, menurunkan investasi dan menurunkan daya beli. Inflasi dapat menguntungkan produsen bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Namun bila kenaikan biaya produksi tinggi maka imbasnya akan ada pengurangan tenaga kerja.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan pengangguran menurut (Todaro M. P., 2011), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan. Dimana pembangunan manusia akan mampu menciptakan tenaga kerja yang mampu menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan maka kualitas sumber daya masyarakatnya akan meningkat. Semakin berkualitas sumber daya manusia suatu negara atau daerah maka masyarakatnya akan sejahtera. Rendahnya indeks kualitas sumber daya manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja penduduk. Produktivitas yang rendah maka pendapatan juga akan rendah. Ketika pendapatan rendah maka penduduk akan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga akan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat untuk memajukan dan mensejahterakan penduduknya. Meski pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri untuk mengentas kemiskinan namun kemiskinan tidak dapat

disingkirkan dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut hukum Okun (*Okuns Law*) bahwa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran (Mankiw, 2018). Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dari tahun ke tahun akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi meningkat akan diikuti oleh peningkatan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa.

Menurut (Hasyim, Ekonomi Makro, 2016), pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan akan menurun. Tingkat kesejahteraan menurun maka akan berimbas terhadap ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat memperbaiki kualitas sumber dayanya karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia”.

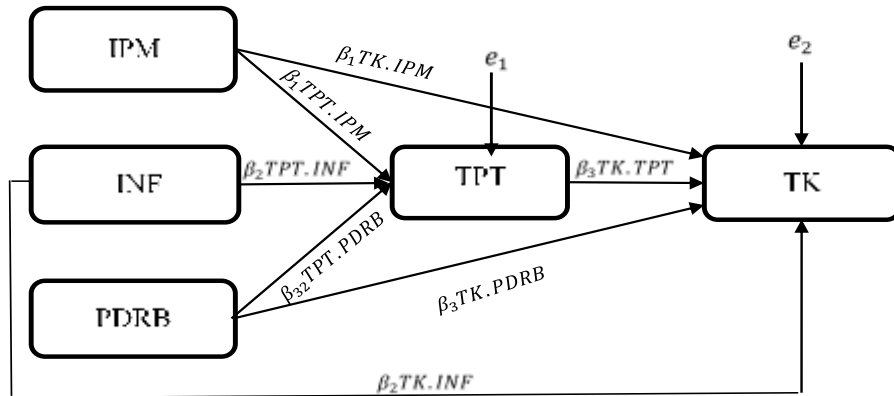
2. METODE

Penelitian ini dilakukan di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa gabungan data *cross section* dengan *time series* dengan jumlah observasi sebanyak 204. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2014-2019. Adapun periode pengamatan dipilih dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 karena untuk mengevaluasi kinerja program pemerintah pada periode tersebut.

Adapun alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan Amos 22. Model analisis jalur (*path analysis*) juga tetap menggunakan persamaan regresi linier

berganda. Pada analisis ini digunakan model persamaan dua jalur.

Model diagram jalurnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Diagram Jalur

Keterangan:

- TK = Tingkat Kemiskinan
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- INF = Inflasi
- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- e_1, e_2 = Koefisien Pengganggu / Error

1. Persamaan Substruktur 1

Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia, untuk permasalahan pertama $TPT = f (IPM; INF; PDRB)$ yang ditransformasikan dengan persamaan ekonometrika sebagai berikut:

$$TPT = \rho_1 IPM + \rho_2 INF + \rho_3 PDRB + e_1 \dots\dots\dots (2.1)$$

2. Persamaan Substruktur 2

Pengaruh IPM, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia untuk permasalahan kedua $TK = f (IPM; INF; PDRB; TPT)$ yang ditransformasikan dengan persamaan ekonometrika sebagai berikut:

$$TK = \rho_1 IPM + \rho_2 INF + \rho_3 PDRB + \rho_4 TPT + e_2 \dots\dots\dots (2.2)$$

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan laporan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan merupakan proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari komponen indeks kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Satuan variabel ini adalah indeks.
2. Inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu. Inflasi dalam penelitian ini adalah Index Harga Konsumen (IHK) dalam satuan persen.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 dalam persen.
4. Pengangguran adalah angka yang menunjukkan banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Data pengangguran yang digunakan dalam

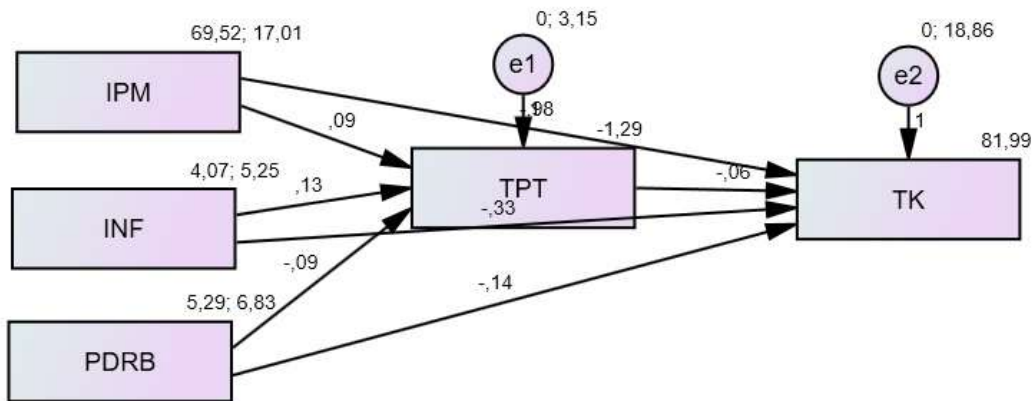
penelitian ini adalah data pengangguran terbuka dalam persen.

5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang digunakan adalah persentase kemiskinan (perdesaan dan perkotaan) Provinsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Setelah membentuk model berdasarkan teori maka didapatkan model analisis jalur sehingga dapat dibangun *path diagram*. *Path diagram* ini sangat memudahkan untuk melihat hubungan kausalitas yang akan diuji. Adapun bentuk model lengkap *Path diagram* hasil olahan data lewat SPSS AMOS 22 didapatkan hasil sebagai berikut:



Sumber: SPSS AMOS 22

Gambar 3.1

Hasil Estimasi IPM, INF, PDRB terhadap TK Melalui TPT

$$TPT = 0.092IPM + 0.128INF - 0.093PDRB + e_1$$

$$TK = -0.983IPM - 0.328INF - 0.145PDRB - 0.063TPT + e_2$$

Dimana persamannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hasil Regresi

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
TPT	<---	IPM	,092	,030	3,033	,002	
TPT	<---	INF	,128	,054	2,357	,018	
TPT	<---	PDRB	-.093	,048	-1,949	,051	
TK	<---	IPM	-.983	,076	-13,004	***	
TK	<---	INF	-.328	,135	-2,430	,015	
TK	<---	PDRB	-.145	,118	-1,229	,219	
TK	<---	TPT	-.063	,172	-.365	,715	

Sumber: SPSS Output Amos 22, data diolah.

Menurut Riduwan dan Ongkos (2012) apabila terdapat koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan, maka menggunakan model *trimming*. Model *trimming* adalah model yang digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan dua atau lebih variabel yang tidak

signifikan, peneliti perlu memperbaiki model struktur analisis jalur yang telah dihipotesiskan.

Jalur yang tidak signifikan dapat kita hapus dan dilakukan estimasi ulang sehingga akan menunjukkan semua jalur yang signifikan. Model akhir setelah revisi disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Hasil Estimasi Model Revisi

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
TPT	<---	IPM	,092	,030	3,033	,002	
TPT	<---	INF	,128	,054	2,357	,018	
TPT	<---	PDRB	-,093	,048	-1,949	,050	
TK	<---	IPM	-,987	,074	-13,303	***	
TK	<---	INF	-,350	,134	-2,621	,009	

Sumber: Output SPSS AMOS 22, data diolah.

Dari Tabel di atas Menunjukkan bahwa semua jalur adalah signifikan. Dengan kata lain, dua hipotesis yang diajukan adalah signifikan. Hasil penghitungan ulang menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki *p-value* lebih kecil dari 0,05 dan bertanda (***)). Hal ini berarti hubungan antar variabel adalah sangat signifikan (*highly significant*) pada level lebih kecil dari 0,01.

Nilai koefisien R Square pengangguran (TPT) mempunyai nilai sebesar 0.084 artinya 8.4 persen variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel IPM, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan selebihnya yaitu sebesar 91.6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini. Nilai R Square dari variabel pengangguran hanya sebesar 8 persen artinya variabel IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi hanya 8.4 persen berkontribusi terhadap pengangguran di Indonesia selama periode 2014-2019.

3.2 PEMBAHASAN

1. Pengaruh IPM terhadap Pengangguran

IPM memiliki hubungan positif terhadap pengangguran bermakna bahwa setiap peningkatan IPM 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.092 persen pada Provinsi di Indonesia. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurcholis, 2014) bahwa IPM berpengaruh positif terhadap pengangguran di Jawa Timur. IPM

merupakan indikator yang terdiri dari 3 komposit yaitu pendidikan, kesehatan dan hidup yang layak. Berdasarkan hasil penelitian IPM memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran yang berarti ketika IPM naik maka akan diikuti dengan kenaikan pengangguran. Hal tersebut dikarenakan meskipun IPM Indonesia terus mengalami kenaikan dan menciptakan sumber daya yang berkualitas dan terampil jika tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja tetap akan meningkatkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan para pencari kerja cenderung memilih-milih pekerjaan karena ingi mendapatkan upah yang lebih tinggi sesuai dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran

Inflasi memiliki hubungan positif terhadap pengangguran bermakna bahwa setiap peningkatan inflasi 1 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 0.128 persen pada Provinsi di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis akan tetapi bertentangan dengan teori *kurva philips* yang menyatakan adanya hubungan negatif antara inflasi dengan pengangguran. Inflasi yang naik tidak dapat dikaitkan dengan kenaikan pengangguran di Indonesia. Sebab dalam mengukur tingkat pengangguran diukur melalui sektor perekonomian dan bukan diukur melalui kenaikan permintaan akibat kenaikan upah. Oleh sebab itu

analisis *A.W Philips* melalui kurva philips tidak sesuai dengan kondisi inflasi dan pengangguran di Indonesia. Dengan demikian perubahan inflasi tidak tepat dihubungkan dengan pengangguran.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negative terhadap pengangguran bermakna bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0.093 persen pada Provinsi di Indonesia Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Sesuai dengan pernyataan hukum *okuns law* bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan menurunkan persentase kemiskinan sebesar 0,172 persen. Dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maka output yang dihasilkan menjadi lebih banyak, dengan demikian tenaga kerja terserap dan persentase pengangguran akan menurun. Hasil ini didukung oleh penelitian (Hussain, 2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ *A Coherent Relationship Between Economic Growth And Unemployem: An Empirical Evidence From Paskistan*” menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 1990 dan menyentuh level terendah tahun 2000 dimana kinerja dari sektor pertanian dan manufaktur sangat rendah membuat tingkat pengangguran di Pakistan meningkat dengan parah.

4. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

IPM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian keputusannya ialah hipotesis diterima. Artinya ada hubungan linier antara IPM dengan kemiskinan. Hasil ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh. IPM mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2012. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Segoro, 2016) menganalisis pengaruh PDRB, IPM dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia bahwa IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan. Ketika ketiga komponen IPM yaitu terutama pendidikan meningkat maka akan menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga tercipta tenaga kerja yang terampil. dengan begitu akan sangat mudah memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

5. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan

Inflasi memiliki hubungan hubungan negatif terhadap kemiskinan bermakna bahwa setiap peningkatan inflasi 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0.328 persen pada Provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara inflasi dengan kemiskinan. Adapun hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Amalia, 2018) bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah perdesaan Provinsi Lampung. Inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dapat dijelaskan dalam penelitian (Kharie, 2007) bahwa inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti perbaikan distribusi pendapatan diantara kelompok penerima pendapatan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pengeluaran konsumsi perkapita, sehingga disaat inflasi naik daya beli masyarakat tidak akan turun dan tingkat kemiskinan disuatu wilayah dapat

berkurang. Penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian di negara Nigeria yang dilakukan oleh Aiyedogbon (2012) yang mengemukakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Nigeria.

6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2019 belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi belum menyebar menyentuh ke golongan masyarakat miskin. Meskipun pertumbuhan ekonomi naik jika tidak diikuti oleh sektor-sektor yang banyak ditempati oleh masyarakat miskin seperti sektor pertanian maka tidak akan mengurangi kemiskinan. Diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang padat kerja oleh golongan bawah. Hal lain yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi tidak menyerap kemiskinan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2019 lebih banyak ditopang oleh konsumsi dibandingkan investasi atau modal sehingga tidak langsung menyentuh kemiskinan.

7. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pengangguran secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan artinya selama periode 2014-2019. Pengangguran tidak dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil tersebut bertentangan dengan Hasil penelitian (Segoro, 2016) yang menganalisis pengaruh PDRB, IPM dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia mengemukakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Indonesia.

Penelitian ini tidak sejalan karena tidak semua orang yang menganggur masuk dalam kategori miskin. Dalam pengangguran terbuka banyak macamnya seperti orang yang sedang mencari pekerjaan, setengah menganggur, mereka yang sedang mempersiapkan usaha dan yang sedang memilah milih pekerjaan dan tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi belum masuk kerja. Dari berbagai macam pengangguran terbuka tersebut tidak masuk dalam kategori miskin, karena sebagian besar mereka terserap kedalam sektor informal yang berarti masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

8. Pengaruh IPM, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan melalui Pengangguran

Dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran sebagai variabel intervening tidak memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut disebabkan bahwa pada tahun 2014-2019 hasil estimasi struktur ke dua menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti meskipun variabel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan efek terhadap peningkatan pengangguran tidak serta merta langsung membuat mereka yang menganggur langsung miskin.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

- 1) IPM, inflasi berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.
- 2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia.
- 3) IPM memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- 4) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

- 5) Inflasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- 6) Pengangguran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
- 7) Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh negatif secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan.

Variabel Inflasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2014-2019. Jika dilihat dari pengaruh tidak langsung hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan tidak langsung antara IPM, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui pengangguran di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amalia, N. (2018). *Human Development Index, Unemployment and Poverty in Papua Province. Vol. 16 nO.1*.
- Baeti, N. (2013). *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017. economics development analisis journal*, 85-97.
- Bappeda. (2015). *Laporan Akhir Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewah Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Baeti, N. (2013). *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017. economics development analisis journal*, 85-97.
- Bappenas. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Kedepatian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Dewi, N. (2017). *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. JOM Fekon*, Vol.4 N
- Development, H. (2009). *United Nations Development Programme (UNDP)*. New York: Oxpord University Press.
- Dewi, N. (2017). *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. JOM Fekon*, Vol.4 No. 1. 870-882.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Depok: Kencana.
- Human Development Report, U. (1995). *Published for the United Nations Development Programe (UNDP)*. New York: Oxpord University Press.
- Junaidi, J. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: PT Penerbit Press.
- Kharie, L. (2007). *Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Kemiskinan di Indonesia*.
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Salemba.
- Nopirin. (2014). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPF.
- Nurcholis, M. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 12 no.1*.
- Pangesti, I. (2018). *Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 5 No. 1 70-81.
- Report, H. D. (2009). *United Nations Development Programme (UNDP)*.

- New York: Oxpord University Press.
- Segoro, W. (2016). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2012. *Vol 6 no.1*.
- Shinta, N. S. (2017). *Analisis Pengaruh Tingkatn Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015*. Banyuwangi.
- Smith, T. d. (2011). *Indeks Pembangunan Manusia*. Sumatera Utara.
- Statistik, B. P. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia*. Sumatera Utara.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesebelas)*. Jakarta: Erlangga.